



LAPORAN

PENGELOLAAN RESIKO

TRIBULAN II

TAHUN 2025

Disusun Oleh:
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LAMONGAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS SOSIAL

Jln. Kusuma Bangsa No.32 Lamongan – Kode Pos 62214
Telp. (0322) 321704 E-Mail :dinsos@lamongankab.go.id
Web Site :www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/12 // /413.202/2025
TANGGAL TERBIT	:	10 Juli 2025

Disiapkan Oleh	:	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN EVALUASI  APRILIA DEWI MAHARANI, SE, MM. NIP. 19800406 201101 2 009
Diperiksa	:	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  MARGONO JAYA PUTRA,S.H, M.Si. NIP. 19740716 199803 1 009
Disahkan Oleh	:	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN  FARAH DAMAYANTI ZUBAIDAH, S.Sos, M.Si NIP. 19730509 199803 2 005

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan menetapkan 3 (Tiga) tujuan Yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan pemerlu pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Meningkatkan Solidaritas masyarakat dalam bergotong royong.

Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) meningkatnya pelayanan terhadap Masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan sosial (PPKS).

- (2) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah (3) Meningkatnya partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Upaya tersebut tidaklah mudah dan perlu adanya kontribusi dari semua unsur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Lamongan pada setiap level untuk menjalankan funsinya masing – masing dengan baik. Disamping itu, setiap aktifitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang dapat berpengaruh dalam pencapaian tujuan pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, upaya implementasi management resiko Dinas Sosial Kabupaten Lamongan perlu dikembangkan lebih lanjut.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya

pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Rencana Monitoring Pi

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda: Pemerintah Kabupaten Lamongan
Tahun Pelajaran: 2025
Tujuan Strategis Pemda:
Urusan Pemerintahan: Pendidikan Sosial
Dinas Terkait: Dinas Sosial

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:						
1	Melakukan Verifikasi dan Validasi	Monitoring dan Evaluasi	Kepala Dinas Sosial	Januari - Desember 2025	Oktober - Desember 2024	Belum Realisasi

2 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Karang Taruna

Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:

1 Validasi lapangan oleh Dinsos, Pendamping YSS dan Kecamatan

2 Komunikasi Pendamping YSS dan Monitor dalam 267 Kecamatan

3 Kepala Dinas Sosial

4 Januari - Desember 2025

5 Oktober - Desember 2024

6 Belum Realisasi

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Dinas Sosial Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulani II, yang telah dilaksanakan adalah dan yang belum dilaksanakan adalah sebagaimana terlampir :

Monitor Risk Event & RTP

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Formulir Kertas Kerja Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Penda: Pemerintah Kabupaten Lamongan

Tahun Penilaian: 2025

Tujuan Strategis Penda:

Urusan Pemerintahan: Pendidikan Sosial

Dinas Terkait: Dinas Sosial

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko		Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab					
Risiko Strategis OPD Dinas Sosial:									
1	Menurunnya aksesibilitas masyarakat terhadap bantuan sosial	RSO 24.06.01.01	-	-	-	Melakukan Verifikasi dan Validasi	Januari - Desember 2025	Oktober - Desember 2025	Belum Realisas.
Risiko Operasional OPD Dinas Sosial:									
1	Intervensi dan kerangka desa ketika pendataan Keluarga Rumah Tengah Peremuan (K RTP)	RSO 24.06.01.02	-	-	-	Validasi lapangan oleh Dinas Pendamping YSS dan Kecamatan	Januari - Desember 2025	Oktober - Desember 2025	Belum Realisas.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Dinas Sosial berikut :

- Kurangnya Pemahaman terkait kegiatan pengelolaan risiko ;
- Kurangnya koordinasi antar lintas sektor ;
- Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi kegiatan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya sehingga risiko pada kegiatan dapat diidentifikasi lebih dini dan terselesaikan sesuai dengan taget yang ditetapkan.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa perlu evaluasi sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.